

PERAN PERBANKAN DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI PROVINSI DIY

Y. Sri Susilo

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No.43 Yogyakarta, 55281

Abstract

This article aimed to identify and analyze the role of banks in financing small and medium business in the Province of Yogyakarta special regency (DIY). The location researched included Kulon Progo regency, Sleman regency, Bantul regency, Gunungkidul regency, and Yogyakarta city. The samples were 220 businessmen categorized as small and medium business. Analysis tool used was descriptive approach. The result of this research was the role of banks in the development of small and medium business in the province of DIY was very important. This was because the role of non-bank credit and financial institutions in the financing of small and medium business was still relatively low. The contribution of banks, particularly in supporting finance was when small and medium business entered business development. When obtaining a bank loan, small and medium business categorized as potential, feasible, and bankable, did not usually meet difficulties. On the other hand, the potential small and medium business categorized feasible but not bankable and categorized not feasible but bankable facilitated access to bank financing requiring a variety of support programs from government and also Bank Indonesia. Further, for potential small and medium business but not feasible and not bankable the financial support was not through banks but through the revolving fund programs and social assistance funds.

Key words: banking, small-medium business, financing

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi (Bank Dunia, 2005). UMKM memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Kontribusi termaksud terutama pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2005, UMKM di Indonesia mampu menyerap 77.678,498 ribu orang atau sebesar 96,77% dari total tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha skala kecil, menengah, dan besar (Sri Susilo, 2007a). Dari sisi jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang mampu diserap maka UMKM jauh lebih besar dari usaha besar. Di sisi lain, dalam hal penciptaan nilai tambah bagi Produk Domestik

Bruto (PDB) maka usaha besar (UB) jauh lebih besar daripada UMKM.

Masalah yang masih dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya produktivitas (Sri Susilo, 2005; Anonim, 2004). Hal tersebut berkaitan dengan: (i) rendahnya kualitas sumberdaya manusia usaha skala mikro, dan (ii) rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha skala mikro. Di samping itu, UMKM menghadapi pula faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja UMKM. Faktor-faktor termaksud adalah (Sri Susilo, 2007b): (i) terbatasnya terhadap akses permodalan, (ii) terbatasnya terhadap akses ke pasar, dan (iii) terbatas akses informasi mengenai sumberdaya dan teknologi.

Korespondensi dengan Penulis:

Y. Sri Susilo: Telp. + 62 274 487 711 Ext.2239

E-mail: yssusilo@gmail.com

Selanjutnya masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi masalah internal dan masalah eksternal (Setyari, 2005; Hafisah, 2004). Masalah yang terkait dengan faktor internal adalah: (1) terbatasnya permodalan, (2) sumber daya manusia yang terbatas, dan (3) lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Selanjutnya masalah yang terkait dengan faktor eksternal adalah: (1) iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, (2) terbatasnya sarana dan prasarana usaha, (3) impikasi otonomi daerah, (4) sifat produk dengan *life time* pendek, (5) terbatasnya akses pasar, dan (6) implikasi perdagangan bebas.

Berkaitan dengan masalah terbatasnya permodalan, UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan. Dari berbagai hasil studi ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Permasalahan ini terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha skala mikro yang kurang atau bahkan tidak *bankable* atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan. Hal ini menyebabkan aspek kelayakan (*feasibility*) debitur dari usaha skala mikro terabaikan (Kantor Bank Indonesia Palembang, 2007).

Di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2006 terdapat 403.348 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 915.100 orang (Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, 2010). Dari jumlah tersebut, sebanyak 331.302 unit usaha (82,14%) tergolong usaha mikro, 66.981 unit usaha (16,61%) termasuk usaha kecil, 4.294 unit usaha (1,06%) tergolong usaha menengah, dan sebanyak 771 unit usaha (0,19%) termasuk dalam usaha besar. Berdasarkan data tersebut maka 99,81% termasuk ke dalam UMKM. Kategori besarnya

unit usaha didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Bagaimana peran perbankan dalam mendukung pembiayaan UMKM di Provinsi DIY? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi fokus artikel ini.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri atas: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (www.depkop.go.id).

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disajikan pada Tabel 1.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan skala industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Definisi BPS termaksud adalah sebagai berikut: (1) Industri Kerajinan Rumah Tangga (IRT) adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang. (2) Industri Kecil (IK) adalah industri dengan

Tabel 1. Kriteria UMKM

Keterangan	Kriteria	
	Asset	Omset
Usaha Mikro	Maks. Rp 50 juta	Maks. Rp 500 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta-Rp 500 juta	>Rp 500 juta-Rp 2,5 milyar
Usaha Menengah	> Rp 500 juta-Rp 10 milyar	>Rp 2,5 milyar-Rp 50 milyar

Sumber: www.depkop.go.id

Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy

Y. Sri Susilo

jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang. (3) Industri Sedang/Menengah (IM) adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang. (4) Industri Besar (IB) adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak > 100 orang (www.bps.go.id).

Industri adalah unit usaha yang melakukan kegiatan produksi, tidak termasuk perdagangan. Dengan demikian industri kerajinan rumah tangga, industri kecil, dan industri sedang merupakan bagian dari UMKM. Walaupun tidak selalu mudah untuk membedakan antara IK dan IRT, namun jika diperhatikan ada beberapa perbedaan utama antara IK dan IRT. Perbedaan-perbedaan tersebut terutama dalam aspek: organisasi, manajemen, metode atau pola produksi, teknologi, pendapatan dan tenaga kerja, produk serta lokasi usaha. Dibandingkan IK, IRT pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti tidak menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dalam suatu perusahaan modern, yaitu tidak adanya pembagian tugas kerja dan sistem pembukuan yang jelas.

Menurut Tambunan (2002), ciri-ciri utama lainnya dari IRT antara lain adalah: (1). Sebagian besar dari pekerja adalah anggota keluarga (suami/istri dan anak) dari pengusaha atau pemilik usaha (*family workers*) yang tidak dibayar (khususnya anggota keluarga), (2) proses produksi dan teknologi produksi dilakukan secara manual dan seringkali direkayasa sendiri, dan kegiatan produksi sehari-hari dilakukan di dalam rumah pemilik usaha (pengusaha), mereka tidak punya tempat khusus (*bengkel/workshop*), (3) sebagian besar IRT terdapat di daerah pedesaan, dan kegiatan produksinya pada umumnya musiman karena mengikuti kegiatan produksi di sektor pertanian yang sifatnya juga musiman, dan (4) jenis produk yang dihasilkan pada umumnya adalah dari kategori barang-barang konsumsi sederhana seperti misalnya alat-alat dapur dari kayu dan bambu, pakaian jadi dan alas kaki.

Berbeda dengan IRT, industri kecil (IK) pada umumnya lebih modern. Karakteristik utama dari IK antara lain adalah (Tambunan, 2002): (1) proses produksi lebih mekanis, dan kegiatan produksi dilakukan

di tempat khusus (pabrik) yang biasanya berlokasi disamping rumah pengusaha atau pemilik usaha; (2) sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di IK adalah pekerja yang dibayar (*wage labour*); dan (3) produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang cukup *sophisticated*.

Studi yang dilakukan oleh Zain, *et al.* (2007) mengenai skema pembiayaan perbankan daerah terhadap UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil studi tersebut antara lain: (1) penyaluran kredit dari perbankan memberlakukan skim yang bersifat general terhadap UMKM, hal ini membuat pengusaha UMKM kesulitan dalam memperoleh kredit perbankan karena alasan persyaratan penjaminan. (2) Akses perolehan permodalan oleh pengusaha UMKM pada umumnya terkendala pada lemahnya sistem administrasi keuangan usaha dan kurangnya jaminan yang *bankable*, daya saing usaha rendah, dan lemahnya integrasi pembinaan UMKM. (3) Proses pelayanan kredit oleh pihak perbankan oleh perbankan dilihat dari rata-rata waktu yang digunakan dalam pengurusan kredit sampai pada pencairan kredit hanya memerlukan waktu yang relatif singkat.

Selanjutnya studi Sri Susilo & Sutarta (2004) menemukan bahwa terbatasnya akses pembiayaan industri kecil terhadap perbankan terutama masalah persyaratan administrasi perkreditan dimana pada umumnya industri kecil tidak *bankable*. Bagi industri kecil yang memperoleh fasilitas kredit dari perbankan menyatakan bahwa kredit tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Kredit tersebut terutama digunakan untuk investasi yang berkaitan dengan peralatan dan modal usaha, termasuk tempat usaha. Bagi industri kecil yang telah berhasil maka pihak perbankan datang untuk menawarkan berbagai fasilitas kredit. Sebagian besar responden mengusulkan prosedur untuk memperoleh kredit perbankan agar lebih dipermudah. Studi ini dilakukan terhadap industri kecil di wilayah Surakarta dan Yogyakarta.

METODE

Lokasi penelitian yang dipilih merupakan pusat/sentra UMKM di Propinsi Daerah DIY. Cakupan lokasi penelitian meliputi sentra UMKM di Kabupaten

Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Data yang digunakan dalam riset mencakup data primer dan data sekunder. Definisi data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli (Kuncoro, 2009). Data primer diperoleh wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan dan juga wawancara mendalam dengan pengusaha/pengrajin UMKM, asosiasi produsen/pengusaha yang terkait, dan dinas/instansi terkait. Data primer yang dikumpulkan antara lain bidang usaha, faktor penghambat, harapan bantuan, modal dan pendanaan, dan rencana pengembangan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2009). Dalam riset ini data sekunder diperoleh dari instansi atau dinas terkait serta perbankan di lingkungan Provinsi DIY. Data sekunder digunakan untuk mendukung hasil analisis.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dalam riset yang menggunakan analisis deskriptif pada dasarnya mengidentifikasi karakteristik dari fenomena yang diamati atau melakukan eksplorasi kemungkinan hubungan dua atau lebih fenomena (Leedy & Ormrod, 2005). Pengertian yang lain, dalam analisis deskriptif memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Kuncoro, 2009). Selanjutnya dalam analisis deskriptif dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian tersebut.

Dalam analisis deskriptif dapat dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil-hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan (Kuncoro, 2009). Kemudian analisis secara deskriptif dapat juga dilakukan dengan teknik statistik yang relatif sederhana, seperti misalnya menggunakan tabel, grafik, dan ukuran tendensi sentral yaitu nilai rata-rata, nilai tengah, dan modus (Kontour, 2003). Dengan demikian sekalipun metode

analisis yang digunakan dalam riset ini relatif sederhana, namun dapat memberikan informasi yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun tahapan/langkah penelitian sebagai berikut: (1) Melakukan pengumpulan data sekunder dari instansi/lembaga terkait serta menyusun kuesioner dan melakukan uji coba kuesioner. (2) Melakukan survei terhadap 220 pengusaha/pengrajin UMKM yang terpilih menjadi responden untuk mencari data dan informasi yang sesuai dengan tujuan studi. Penentuan besar sampel (*sample size*) untuk masing-masing wilayah dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sedangkan pemilihan sampel pengusaha/pengrajin UMKM dilakukan *convenience sampling* (Sekaran & Bougie, 2010). (3) Melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap 10 yang mewakili sampel atau responden. Metode yang dipilih untuk menentukan sampel adalah *convenience sampling* (Sekaran and Bougie, 2010). Tujuan dilakukan wawancara mendalam agar diperoleh informasi yang lebih mendalam dari jawaban-jawaban yang telah diberikan berdasarkan pertanyaan dalam kuesioner. (4) Melakukan wawancara mendalam pihak-pihak terkait yaitu instansi/dinas terkait dan perbankan. Penentuan sampel dilakukan dengan *convenience sampling*. (5) Dari data primer dan sekunder yang terkumpul, baru kemudian diolah dan diuji secara statistik sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL

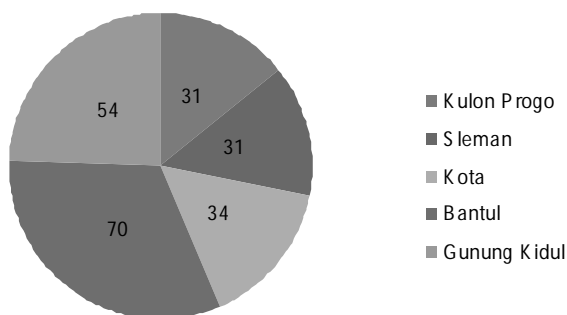
Profil Responden

Gambar 1 memaparkan komposisi sampel responden UMKM di 4 (empat) kabupaten dan kota Yogyakarta. Jumlah sampel dari Kabupaten Bantul merupakan jumlah terbesar, diikuti Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo. Distribusi ini sesuai dengan jumlah UMKM yang menjadi responden di masing-masing daerah tersebut. Total sampel yang menjadi responden sebanyak 220 pengusaha/pengrajin UMKM. Distribusi sampel adalah Kabupaten Kulon Progo (31 responden), Kabupaten Sleman (31 res-

Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy

Y. Sri Susilo

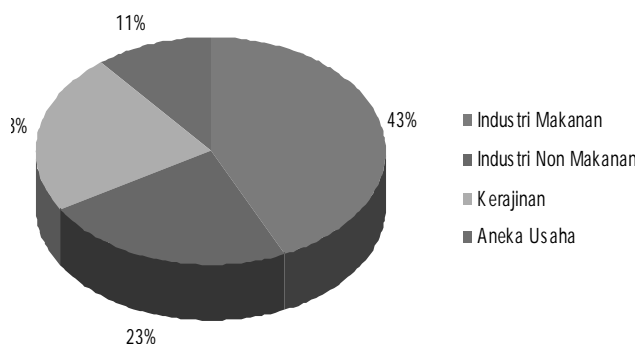
ponden), Kota Yogyakarta (34 responden), Kabupaten Bantul (70 responden), dan Kabupaten Gunung Kidul (54 responden).



Gambar 1. Jumlah Responden

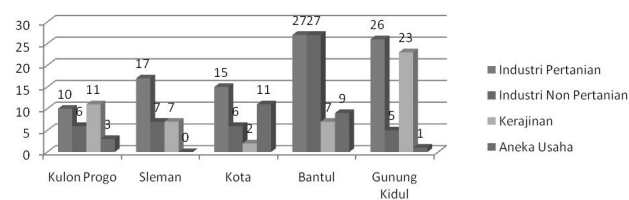
Deksripsi UMKM menurut lapangan usahanya, sesuai dengan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 dapat dibagi dalam kelompok Industri Pertanian, Industri Non Pertanian, Kerajinan dan Aneka Usaha (Gambar 2). Dari berbagai kelompok tersebut, maka UMKM di Yogyakarta terbanyak beroperasi pada bidang usaha industri pada komoditas yang berkaitan dengan produk pertanian. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu ketersediaan bahan baku, ketersediaan SDM yang sesuai serta skala usaha yang cocok bagi pasar lokal dan regional. Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata memiliki peran besar bagi berkembangnya UMKM yang bergerak pada bidang kerajinan.

Selanjutnya komposisi menurut bidang usaha, industri pertanian/makanan mencakup industri tempe, tahu, bakpia, geplak, kerupuk, nata de coco, serta aneka roti dan kue. Untuk industri non-pertanian/non-makanan mencakup industri genteng, gamelan, mebel kayu, mebel bambu, dan industri konfeksi. Kemudian yang tergolong kerajinan diantaranya kerajinan kulit, batik, perak, gerabah dan keramik. Cakupan aneka usaha meliputi industri cinderamata (ornamen batu, topeng kayu, serabut kelapa, bambu, hiasan dinding, lukisan batik, dan lukisan



Gambar 2. Komposisi Menurut Bidang Usaha

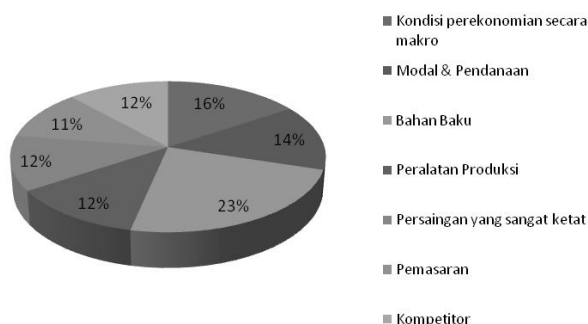
kulit). Distribusi jumlah sampel menurut kelompok usaha industri pertanian/makanan, industri pertanian non-pertanian, industri kerajinan, dan aneka usaha disajikan pada Gambar 3. Berdasarkan grafik tersebut jumlah sampel paling banyak berlokasi di Kabupaten Bantul, kemudian masing-masing diikuti Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Sampel di Kabupaten Bantul mencakup industri non-pertanian (27 responden), industri pertanian (27 responden), industri kerajinan (7 responden), dan industri aneka usaha (9 responden).



Gambar 3. Bidang Usaha UMKM Masing-Masing Daerah

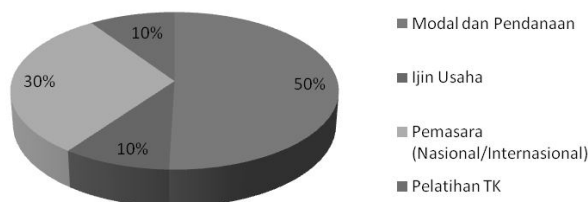
Jika diamati berbagai faktor yang menjadi penghambat usaha UMKM seperti dipaparkan pada Gambar 4, maka jawaban sebagian besar para responden menyatakan pada faktor yang terkait dengan bahan baku (23%), kondisi makro ekonomi (16%), kekurangan modal dan pendanaan (14%), peralatan usaha (12%), sedangkan faktor berikutnya adalah persaingan usaha seperti persaingan usaha yang ketat (12%), kompetitor (12%), dan pemasaran (11%).

Hambatan dan Masalah Yang Dihadapi UMKM



Gambar 4. Berbagai Faktor Penghambat Usaha

Harapan kepada pelaku usaha kepada pemerintah yang utama adalah bantuan penyediaan modal dan pendanaan untuk pengembangan usaha (Gambar 5). Hasil survei menunjukkan bahwa 50% responden berharap memperoleh bantuan modal dan pendanaan. Faktor selanjutnya yang diharapkan dapat dilakukan pemerintah adalah kebijakan penurunan pajak dan bantuan dalam berbagai kebijakan untuk membantu melakukan pemasaran, khususnya untuk meningkatkan ekspor.

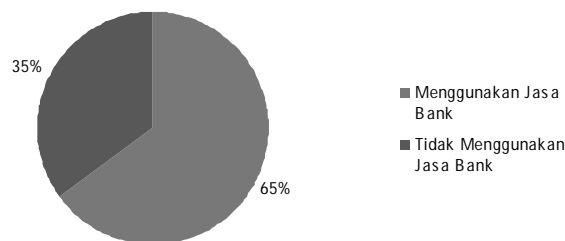


Gambar 5. Harapan Bantuan dari Pemerintah

Modal dan Pendanaan

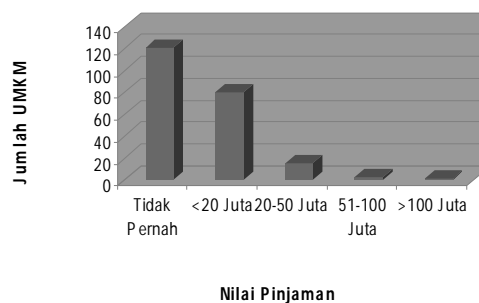
Berkaitan dengan modal dan pendanaan untuk pengembangan UMKM, maka peran perbankan sangatlah penting. Sebagian besar responden UMKM telah menggunakan jasa perbankan untuk mencukupi kebutuhan modalnya, yaitu mencapai 65% dari total jumlah responden (Gambar 6). Sisanya sebanyak 35%

belum menggunakan jasa perbankan. Hal ini memperkuat kondisi objektif bahwa UMKM masih kesulitan untuk mengakses sumber pembiayaan dari perbankan (Situmorang dan Situmorang, 2007, Sri Susilo dan Sutarta, 2004). Penggunaan jasa perbankan dalam hal ini mencakup penggunaan jasa perbankan untuk transaksi yang berkaitan dengan operasi usaha dan kredit usaha untuk pengembangan usaha.



Gambar 6. UMKM Pengguna Jasa Perbankan

Adapun besarnya pinjaman yang dilakukan oleh responden dapat diklasifikasikan seperti pada Gambar 7. Sebagian besar dari responden yang melakukan pinjaman ke bank dalam jumlah pinjaman kurang dari 20 juta rupiah, kemudian antara 20 – 50 juta rupiah (Gambar 7). Kondisi ini tentu mencerminkan skala usaha yang masih relatif kecil. Hasil survei sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sri Susilo & Sutarta (2004) dan Tambunan (2008).



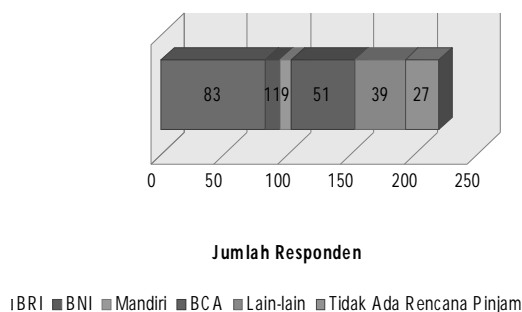
Gambar 7. Besarnya Pinjaman UMKM

Jika diamati jenis perbankan yang menjadi tujuan responden UMKM untuk mengajukan pinjaman, maka sebagian besar responden mengajukan pin-

Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy

Y. Sri Susilo

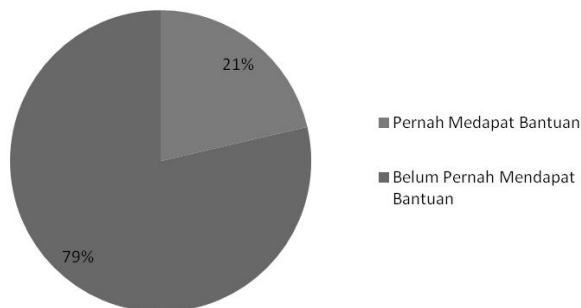
jaman ke bank pemerintah, khususnya Bank BRI (Gambar 8). Berdasarkan wawancara mendalam dengan responden Bank BRI memang relatif memberikan perhatian yang lebih besar terhadap UMKM dibandingkan bank-bank umum lainnya. Di sisi lain dalam layanan terhadap nasabah Bank BRI relatif lama atau kalah cepat dibandingkan dengan bank-bank umum yang lain. Bank swasta seperti Bank BCA juga menjadi pilihan kedua bagi responden. Ini menunjukkan bahwa bank yang memiliki jaringan luas dan menjangkau banyak lapisan masyarakat menjadi pilihan responden UMKM untuk melakukan pinjaman. Bank BNI dan Bank Mandiri yang merupakan bank pemerintah hanya memiliki porsi yang relatif kecil sebagai pilihan tempat meminjam bagi responden.



Gambar 8. Bank Tempat Meminjam UMKM

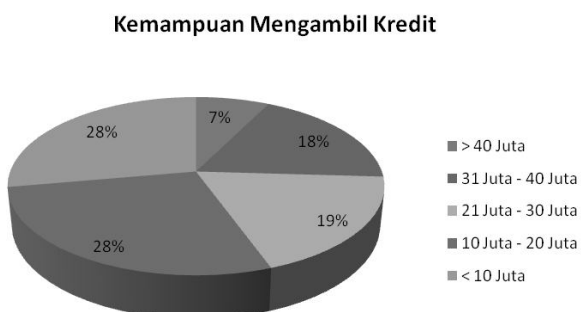
Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa hanya 21% dari total respon yang menyatakan pernah mendapat bantuan, baik berupa bantuan finansial maupun bantuan teknis atau peralatan (Gambar 9). Bantuan yang mereka peroleh berasal dari pihak pemerintah dan pihak lainnya. Melihat kondisi objektif bahwa sebagian besar responden (79%) belum pernah memperoleh bantuan maka dalam hal pemberian bantuan kepada UMKM maka perlu ditingkatkan baik secara kuantitas, kualitas, maupun pemerataannya.

Dalam hal kemampuan mengambil kredit dari perbankan sebagian besar responden mengambil kredit sebesar 10 – 40 juta rupiah (65%). Kemudian sisanya sebanyak 7% hanya mampu mengambil kredit sebesar < 10 juta rupiah dan sebanyak 28% mam-



Gambar 9. Jumlah UMKM Pernah Menerima Bantuan dari Pihak Lain

pu mengambil kredit > 40 juta rupiah (Gambar 10). Kemampuan mengambil kredit tergantung dari kemampuan internal dan kelayakan usaha dari UMKM, sedangkan dari aspek eksternal kebijakan dan dukungan perbankan menjadi hal yang signifikan.

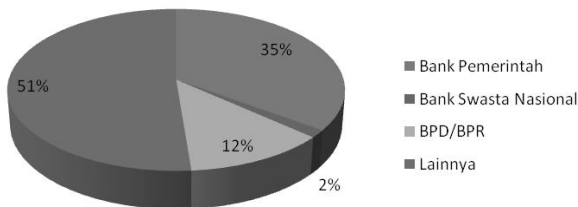


Gambar 10. Kemampuan Mengambil Kredit

Rencana Pengembangan Ke Depan

Pelaku UMKM memiliki visi untuk mengembangkan usahanya dalam masa yang akan datang. Berdasarkan data pertanyaan yang diajukan kepada pengusaha, sekitar 90% menjawab akan melakukan usaha pengembangan. Pengembangan ini berkaitan dengan kebutuhan dana untuk investasi. Para pelaku UMKM berharap kepada bank pemerintah untuk mendukung pendanaan dalam pengembangan usahanya (Gambar 11). Dua faktor penting peran perbankan dalam pengembangan UMKM adalah pemberi-

an kredit dengan bunga rendah dan proses yang sederhana.



Gambar 11. Harapan Sumber Dana Pengembangan

PEMBAHASAN

Menurut Bank Indonesia berdasarkan pola pembiayaan dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu (Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, 2010): (1) UMKM yang potensial namun tidak *feasible* dan tidak *bankable*. (2) UMKM yang potensial dan *feasible* namun tidak *bankable*. (3) UMKM yang potensial dan *bankable* namun tidak *feasible*. (4) UMKM yang potensial, *feasible* dan *bankable*.

Untuk kelompok UMKM yang potensial namun tidak *feasible* dan tidak *bankable* pola pembiayaannya tentu tidak melalui perbankan. Pola pembiayaan yang tepat untuk kelompok ini adalah melalui dana bergulir dan dana bantuan sosial serta didukung dengan program pembimbingan teknis. Selanjutnya untuk UMKM yang potensial dan *feasible* namun tidak *bankable*, pembiayaannya dapat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sertifikasi hak atas tanah dengan program penjaminan kredit dan peningkatan akses ke lembaga pembiayaan.

Kemudian untuk UMKM yang potensial dan *bankable* namun tidak *feasible*, pembiayaannya dapat dilakukan melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Program Eks Kredit Lunak Bank Indonesia (KLBI), Kredit Pengembangan Energi Nabati - Revitalisasi Pertanian (KPEN - RP), dan Kredit

Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Eks Surat Utang Pemerintah No. SU-05.Mk/1999 dengan program subsidi bunga dan penjaminan kredit. Untuk UMKM yang potensial, *feasible* dan *bankable*, pembiayaannya melalui perbankan pada umumnya. Kelompok ini tidak diperlukan program khusus, dikarenakan secara teknis kelompok ini mampu memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari perbankan. Bahkan untuk kelompok UMKM ini, pihak perbankan melakukan "jemput bola", yaitu perbankan mendatangi dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan kredit yang diajukan oleh UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai pihak (Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY, Perbankan, KADIN, dan responden), maka pembiayaan UMKM melalui perbankan seharusnya difokuskan untuk UMKM potensial yang termasuk kategori yang kedua (*feasible* dan tidak *bankable*), dan ketiga (tidak *feasible* dan *bankable*). Dalam memberikan atau menyalurkan kredit terhadap UMKM, perbankan dengan ketat mempersyaratkan ketentuan "The Five of Credit" (5C), yaitu *character*, *capital*, *collateral*, *capacity of repayment*, dan *condition of economic* (Subandi, 2007). Sebagian dari besar responden (70%), belum memenuhi persyaratan kriteria 5C dari perbankan. Kelemahan sebagian besar responden antara lain dari: (1) Aspek karakter (*character*) UMKM ditandai dengan: (a) belum baiknya sistem administrasi dalam usaha, khususnya administrasi keuangan, (b) rendahnya kualitas sumber daya manusia, (c) ketidakpastian ketersediaan bahan baku, dan (d) peralatan produksi yang sederhana sehingga produktifitasnya rendah. (2) Aspek pemilikan modal (*capital*) UMKM ditandai dengan: (a) kecilnya rata-rata pemilikan aset, (b) terbatasnya rata-rata pemilikan modal, dan (c) perkembangan dari kedua aspek tersebut sangat rendah, karena rendahnya tabungan akibat kecilnya laba bersih yang diperoleh. (3) Aspek kepemilikan agunan (*collateral*) dimana kemampuan UMKM untuk memberikan agunan rendah, hal ini dikarenakan terbatasnya aset berharga dan kurangnya legalitas aset yang dimiliki UMKM. (4) Aspek kemampuan membayar

Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy

Y. Sri Susilo

(*capacity of repayment*), UMKM pada umumnya usaha keluarga dan cenderung belum memisahkan antara administrasi keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga. Kondisi ini mempersulit perbankan untuk mengetahui kemampuan membayar UMKM. (5) Kondisi perekonomian (*condition of economic*) juga berpengaruh terhadap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit, khususnya kredit bagi usaha yang mempunyai risiko tinggi.

Dengan melihat kondisi objektif tersebut maka pendapat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM difokuskan pada kelompok yang kedua dan kelompok ketiga patut dipertimbangkan. Tentu tidak melupakan penyaluran kredit bagi UMKM yang termasuk kelompok keempat. Untuk kelompok tersebut yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas pelayanan bagi UMKM.

Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan dari perbankan. Upaya ini tentu tidak dapat dilakukan oleh UMKM sendiri, namun diperlukan *stakeholders* yaitu pemerintah, asosiasi pengusaha, LSM, dan perguruan tinggi. Khusus pemerintah, perannya sebagai fasilitator ke depan harus dikurangi dan digantikan dengan peran sebagai regulator. Peran sebagai regulator lebih diarahkan pada pemberdayaan (*empowering*) melalui strategi perkuatan (*empowering*). Dengan strategi diharapkan lebih efektif dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator melalui strategi pelayanan (*servicing*). Hal ini terbukti adanya keterikatan masyarakat dan koperasi terhadap bantuan pemerintah.

Di samping mengoptimalkan peran perbankan, maka perlu upaya untuk lebih mendorong peran lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk memberdayakan UMKM. Sebagai alternatif maka peran modal ventura (*capital venture*) dan lembaga penjamin kredit (LPK) perlu didorong untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM di Provinsi DIY. Dalam hal ini LKBB untuk mendukung percepatan pemberdayaan UMKM di berbagai pelosok pedesaan dimana akses perbankan masih terbatas (Idris, 2006).

Alokasi kredit perbankan untuk pembiayaan usaha di Provinsi DIY untuk seluruh usaha per Desember 2009 sebesar Rp 10.101.838 juta. Dari jumlah tersebut, teralokasi untuk kredit UMKM sebesar Rp 9.070.678 juta atau sebesar 89,26%. Kondisi ini tidak terlepas dari jumlah unit usaha di Provinsi DIY mayoritas termasuk UMKM (99,815). Dengan demikian alokasi kredit perbankan untuk pembiayaan usaha di Provinsi DIY sudah proporsional sesuai dengan jumlah UMKM yang ada. Kondisi ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong perbankan dalam mengembangkan UMKM. Dukungan Bank Indonesia melalui kebijakan yang bersifat *demand side* maupun *supply side* bertujuan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya akses UMKM kepada perbankan melalui mekanisme hubungan bisnis yang saling menguntungkan sehingga dapat berkesinambungan (Setyobudi, 2007). Di samping itu kinerja kredit UMKM di Provinsi DIY per Desember 2009 juga tergolong sangat baik, hal tercermin dari *non-performance loans* (NPL) hanya sebesar 2,62% dari total kredit. Sebagai komparasi NPL untuk seluruh total kredit perbankan di Provinsi DIY mencapai 2,86%.

Berkaitan dengan kredit perbankan untuk UMKM di Provinsi DIY ada hal yang masih mengganjal yaitu permasalahan kredit UMKM korban gempa tahun 2006. Seperti diketahui sebagian besar UMKM korban gempa kegiatan usahanya terganggu dan ada yang menutup usahanya. Untuk kredit sampai dengan Rp 50 juta, Pemerintah Provinsi DIY telah membayar melalui APBD, sedangkan untuk kredit sebesar Rp 50 juta ke atas sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

Bank Indonesia mencoba membantu penyelamatan kredit UMKM dengan menerbitkan PBI nomor 8/10/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006 (Kuncoro, 2008). Peraturan BI tersebut menggariskan bahwa bentuk-bentuk penyelamatan UMKM melalui tiga cara, yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sebagian besar kredit UMKM korban gempa memang direstrukturisasi perbankan. Hasil

restrukturisasi tidak sepenuhnya berhasil karena masih dijumpainya sejumlah UMKM yang kualitas kreditnya tidak membaik.

Meskipun sudah ada PBI No.8/10/PBI/2006, UMKM yang tidak menikmati program tersebut cukup besar, yaitu 40%. Jenis restrukturisasi yang paling banyak diterima oleh UMKM adalah penjadwalan kembali (81%). Dalam praktik, restrukturisasi ternyata tidak berjalan lancar, setidaknya 26% UMKM menyatakan program restrukturisasi kurang efektif. Ketidakefektifan program tersebut disebabkan karena bentuknya yang tidak sesuai dengan kebutuhan (51%). Mengingat kondisi tersebut, bantuan yang mendesak diperlukan saat ini adalah bantuan modal untuk penyelesaian kredit bermasalah maupun pemulihan usaha. Bantuan modal mendesak diberikan karena hanya sebagian kecil UMKM yang mampu mengembalikan kreditnya tanpa adanya keringanan (39%), sisanya menyatakan tidak mampu mengembalikan apabila tidak ada keringanan. Keringanan yang dimaksud adalah *write off*, *hair cut*, dan moratorium kredit (Kuncoro, 2008).

Berkaitan dengan usulan penghapusan atau pemutihan kredit UMKM kredit gempa, pemerintah kesulitan untuk menerapkannya karena terkait dengan regulasi yang ada. Hal tersebut dapat dijalankan dengan melakukan revisi undang-undang yang berlaku pada saat ini. Selanjutnya Bank Indonesia (BI) memperpanjang jangka waktu restrukturisasi kredit bagi UMKM korban gempa bumi di Provinsi DIY hingga akhir Desember 2010. Perpanjangan itu dituangkan dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 11/27/2009 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank pascabencana alam di Provinsi DIY dan daerah sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah. PBI itu dikeluarkan dengan pertimbangan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di DIY masih belum sepenuhnya pulih sejak terjadinya gempa bumi 27 Mei 2006.

Total kredit UMKM korban gempa yang dilaporkan perbankan di DIY kepada BI Yogyakarta hingga Maret 2009 berjumlah Rp179,8 miliar. Kredit tersebut direlaksasi dengan PBI, yang berfungsi untuk

melindungi UMKM agar bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR) tidak melakukan eksekusi jaminan atau agunan. Ia mengatakan, dengan adanya PBI, kualitas kredit bagi bank umum dan BPR yang direstrukturisasi ditetapkan lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai akhir Desember 2010. Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA) secara bertahap, yakni paling kurang sebesar 15% dari jumlah kredit yang belum tertagih pada akhir Desember 2009. Selain itu, paling kurang sebesar 50% dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Juni 2010, dan paling kurang sebesar 100% dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Desember 2010.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran perbankan dalam pembiayaan UMKM pada industri kecil di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan perbankan perlu ditingkatkan, termasuk juga sumber-sumber pembiayaan lain non-perbankan seperti modal ventura dan lembaga penjamin kredit. Salah butir Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 juga mengamanatkan hal tersebut. Koordinasi kementerian dan institusi lain dalam upaya meningkatkan akses tersebut perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal. Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Bank Indonesia No. 23/1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 3/2004, peranan Bank Indonesia dalam membantu pemberdayaan sektor riil dan UMKM menjadi bersifat tidak langsung. Peran BI tetap penting, terutama dalam hal kebijakan perkreditan, seperti misalnya dalam membantu menangani permasalahan kredit UMKM korban gempa di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

Saran

Dari sisi pelaku UMKM di Provinsi DIY, agar akses terhadap kredit perbankan dapat meningkat maka harus belajar untuk meningkatkan kemampuan manajerialnya, terutama dalam aspek administrasi

Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy

Y. Sri Susilo

usaha pada umumnya dan administrasi keuangan pada khususnya. Di sisi lain pihak perbankan harus mencari terobosan dan inovasi agar pelaku UMKM dapat mempermudah akses sumber pembiayaan melalui kredit perbankan, seperti misalnya dalam persyaratan kredit dan suku bunga.

Berkaitan dengan riset selanjutnya perlu difokuskan responden dari kelompok bidang usaha tertentu, misalnya dari kelompok industri kerajinan. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil yang lebih rinci dari permasalahan perkreditan dari setiap kelompok bidang usaha. Dari aspek metode riset disarankan untuk menggunakan metode *focus group discussion* (FGD) agar diperoleh data dan informasi yang lebih lengkap baik dari pihak UMKM, perbankan, dan *stakeholders* yaitu pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Pengkajian Usaha Mikro di Indonesia. *Himpunan Abstrak Hasil Penelitian Koperasi dan UKM*. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 23 Januari 2008.
- Bank Dunia. 2005. Mendukung Usaha Kecil dan Menengah. *Policy Brief*. Diakses dari <http://www.worldbank.or.id> pada tanggal 20 Juli 2005.
- Departemen Perdagangan. 2010. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Departemen Perdagangan RI, Jakarta. Diakses dari <http://www.depdag.go.id> pada tanggal 8 September 2010.
- Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan UKM. *Infokop*, Nomor 25 Tahun 2004, 40 – 44. Diakses dari <http://www.depkop.go.id> pada tanggal 8 September 2010.
- Idris, I. 2006. Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Untuk Pemberdayaan UKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, No.2 Tahun I, hlm.99-105.
- Kantor Bank Indonesia Yogyakarta. 2010. Kebijakan Pengembangan dan Perkembangan Perkreditan UMKM DIY. *Makalah*. Diskusi Kebijakan dan Strategi Pengembangan UMKM di Provinsi DIY. Fakultas Ekonomi UAJY dan ISEI Cabang Yogyakarta. Yogyakarta 29 Juni 2010.
- Kantor Bank Indonesia Palembang. 2007. *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Propinsi Kep. Bangka Belitung Triwulan II 2007*. Suplemen 2: Mengkonsolidasikan Dukungan terhadap UMKM. Diakses dari <http://www.bi.go.id> pada tanggal 6 September 2010.
- Kuncoro, M. 2008. Write Off Kredit UMKM. *Kedaulatan Rakyat*. 10 Desember 2008. Diakses dari <http://www.mudrajad.com> pada tanggal 30 Oktober 2010.
- Leedy, P.D. & Ormrod, J.E. 2005. *Practical Research: Planning and Design*, 8th Edition, Pearson Education Pte., Singapore.
- Sekaran, U. & Bougie, R. 2010. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*, 5th Edition, John Wiley and Sons Inc., USA.
- Setyari, N.P.W. 2005. Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia. *Working Paper*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Setyobudi, A. 2007. Peran Serta Bank Indonesia Dalam Mengembangkan UMKM. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, Vol.5, No.2, hlm.29-35.
- Situmorang, J.W. & Situmorang, J. 2007. Suku Bunga Perbankan Masih Penghambat Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Artikel*. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 23 Agustus 2010.
- Sri Susilo, Y. 2007a. Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Eksekutif*, Vol.4, No.2, hlm.306-313.
- Sri Susilo, Y. 2007b. Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris Pedagang "Kliithikan" di Alun-alun Selatan. *Jurnal Ekonomi*, Tahun XII/01/2007, hlm.64-77.
- Sri Susilo, Y. 2005. Strategi Survival Usaha Mikro Kecil (Studi Empiris Pedagang Warung Angkringan di Yogyakarta). *Telaah Bisnis*, Vol.6, No.2, hlm.161-178.
- Sri Susilo, Y. & Sutarta, A.E. 2004. Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, hlm.65-78.
- Subandi, S. 2007. Potensi Pengembangan Permodalan UMKM Dari Pinjaman Perbankan. *Artikel*. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 23 Agustus 2010.
- Tambunan, T.T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Cetakan I. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, H.M.Y., Fattah, S., Djauhariyah, L., Siswadharna, B., Mustari, B., & Tadjibu, M.J. 2007. *Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan*. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 23 Agustus 2010.

